

Stagflasi Dunia dan Presidensi G20 Indonesia

Sawidji Widodo

Pengajar Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara

Laporan Bank Dunia edisi Juni 2022, "Global Economic Prospect", menyebut stagflasi dunia sudah di depan mata.

Dalam ilmu ekonomi, stagflasi berarti pertumbuhan ekonomi turun, dan inflasi meningkat. Untuk kalangan awam, untuk lebih menggambarkan magnitudonya, efeknya pendapatan masyarakat menurun, dan kesulitan (hidup) meningkat.

Data lembaga survei Consensus Economic, yang juga dirujuk Bank Dunia, tahun ini sebagian besar negara, terutama negara maju, menghasilkan kurva silang (membentuk huruf X) untuk data inflasi dan pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB).

Kurva inflasi mengarah ke kanan atas (timur laut) memotong kurva pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke kanan bawah (enggara). Artinya, angka inflasi lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Untuk 2022, inflasi dunia diperkirakan bertengger di angka 6,2 persen, sedangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi hanya 3,3 persen. Bahkan Bank Dunia memberikan perkiraan lebih rendah, yaitu 2,9 persen.

Gap domestik dan dunia

Dengan gap angka pertumbuhan ekonomi yang besar itu, wajar Bank Dunia menyebut istilah stagflasi. Yang memprihatinkan, lebarnya gap angka inflasi dengan angka pertumbuhan ekonomi itu banyak terjadi di negara-negara maju, karena ini akan menghambat laju pemulihan ekonomi dunia.

Negara-negara yang paling besar gapnya adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, dan Jerman. Adapun yang selisihnya cukup kecil adalah Perancis,

Kanada, dan Korea Selatan.

Gap inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dunia itu diprediksi lebih lebar lagi seandainya tidak terjadi "keajaiban" di negara-negara berkembang. Jika dibandingkan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di atas dengan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi dunia, angka inflasi di negara-negara maju lebih tinggi daripada angka inflasi dunia. Sebaliknya, angka pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada angka pertumbuhan ekonomi dunia. Ini terjadi pada AS, Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman.

Sementara yang angka inflasinya lebih rendah daripada angka inflasi dunia dan angka pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi dunia adalah Jepang, Kanada, dan Australia.

Hal berbeda terjadi pada negara berkembang. Di sebagian negara sedang berkembang, angka inflasi lebih rendah daripada angka inflasi dunia, dan angka pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi dunia.

Posisi terbaik ada di kawasan Asia, dengan bintangnya negara-negara anggota ASEAN. Kawasan ini ekonominya masih tumbuh di kisaran 4-5 persen, dengan tingkat inflasi 3-4 persen. Vietnam, misalnya, tahun ini diperkirakan tumbuh 5,8 persen, dengan tingkat inflasi sekitar 3 persen. Dengan prediksi seperti itu, Vietnam menduduki peringkat inflasi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh 5,6 persen dan inflasi 4,2 persen.

Untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 persen, dan tingkat inflasi menurut perkiraan Bank Indonesia akan mencapai 4,2 persen. Selanjutnya ada China yang diperkirakan tumbuh 4,3 persen, dengan tingkat inflasi 2,1 persen. Tiga negara ini bisa dikatakan termasuk dalam kategori baik.

Malaysia dan Taiwan masuk kategori sedang karena, meskipun angka inflasinya di bawah angka inflasi dunia, dan angka pertumbuhan ekonominya di atas angka pertumbuhan ekonomi dunia, selisihnya tidak terlalu besar.

Singapura dan Hong Kong, meskipun angka inflasinya di bawah angka inflasi dunia, dan angka pertumbuhan ekonominya di atas angka pertumbuhan ekonomi dunia—disertai selisih yang lumayan tinggi—kedua negara itu mengalami stagflasi. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan Thailand, yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada angka pertumbuhan ekonomi dunia, dan dilengkapi dengan stagflasi. Dengan demikian, ketiga negara ini masuk kategori jelek.

Arab Saudi dan India mencatatkan pertumbuhan ekonomi luar biasa tinggi untuk ukuran saat ini, yaitu di atas 7 persen dan tingkat inflasi lebih rendah daripada tingkat inflasi dunia, tetapi kedua negara itu tidak dapat mewakili kawasan masing-masing. Kedua negara itu merupakan pengecualian dari sebagian besar negara di kawasan yang jelek kinerjanya.

Demikian pula dengan Argentina, juga termasuk pengecualian, meskipun hanya dapat dikategorikan sedang, seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini karena kinerja sebagian besar ekonomi negara-negara di kawasan Amerika Latin juga tidak terlalu bagus. Bahkan kinerja ekonomi Brasil sama dengan negara yang jadi biang kerok stagflasi, Rusia. Angka inflasi di kedua negara itu jauh di atas angka inflasi dunia, dan angka pertumbuhan ekonominya jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi dunia.

Langkah adil

Dalam kondisi normal, negara-negara maju biasanya dijadikan tumpuan pasar produk-produk dari negara berkembang. Dengan kondisi stagflasi, tentu akan mengurangi atau malah menutup peluang



eksportir tersebut. Tentu adil jika ada langkah-langkah bijaksana yang bisa diambil. Pertama, misalnya, Rusia bersedia menghentikan perang, karena sebelum Rusia menyerang Ukraina, ekonomi dunia sudah mulai pulih seiring dengan mulai meredanya pandemi Covid-19.

Invasi Rusia memonopoli jalan peralihan ekonomi yang sudah sesuai *track*. Karena perang itu menambah gangguan rantai pasok dunia yang sudah dibuat pandemi. Tentu Rusia tak bisa diharapkan bermurah hati sendirian. Di sini diperlukan kerja-kerja politik para pemimpin dunia.

Kedua, AS dan sekutunya mungkin bisa membalas kemarahan hati Rusia dengan mengurangi atau menghilangkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan sehingga Rusia bisa mulai memasok komoditas yang dibutuhkan mitra-mitra dagangnya. Ini juga diperlukan pembicaraan politik tingkat tinggi.

Ketiga, Arab Saudi bisa menambah pasokan minyak agar

di negara-negara sedang berkembang sehingga mengurangi kemampuan mereka menghindari dari resesi atau malah ikut terjerang stagflasi. Selain itu, pulang kandangnya dolar AS juga akan mengurangi suplai valas sehingga bisa memperlemah mata uang negara-negara berkembang. Bagi negara yang ekonominya ditopang ekspor, kondisi itu memang menguntungkan. Namun, bagi negara-negara lebih banyak mengimpor, akan memperberat upaya menahan stagflasi.

Memang pilihan instrumen untuk menjinakkan inflasi sangat terbatas, kalau tidak mau disebut hanya ada satu: menaikkan suku bunga. Penyebabnya, inflasi saat ini disebabkan negatifnya penawaran agregat (*aggregate supply*), sebagai dampak dari terganggunya rantai pasok akibat pandemi, ditambah perang dagang AS-China, dan sekarang ditambah lagi perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, juga terjadi negatif suplai tenaga kerja, karena pilihan pensiun dini sebagai dampak pandemi, semakin menunggang tenaga kerja, dan resistansi untuk kerja migran. Kondisi inilah yang tak memungkinkan negara maju memilih kebijakan memacu pertumbuhan ekonomi, daripada menajamkan inflasi dengan meningkatkan suku bunga.

Hal lain yang juga membatasi pilihan kebijakan adalah tren proteksionistik yang menurut catatan Nouriel Roubini—profesor ekonomi yang pernah bekerja untuk IMF Bank Dunia, dan The Fed—sudah mulai menggejala sebelum pandemi Covid-19 hadir.

Selanjutnya, China juga dapat berkontribusi dalam kebijakan domestiknya dengan memperlonggar *lockdown* sehingga dapat memperlancar pergerakan orang dan barang, yang ujungnya memperlancar jalannya rantai pasok global.

Presidensi Indonesia

Memang semua alternatif di atas tak mudah untuk dilaksa-

nakan. Namun, jika tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif, bisa jadi stagflasi dunia akan berlanjut ke 2023. Padahal, semula diyakini perekonomian global sudah bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi pada 2022.

Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada 2022 dengan slogan *Recover Together, Recover Stronger* dituntut bisa mendorong kerja sama dan kerja bersama untuk mewujudkan slogan tersebut.

Jika Indonesia gagal menjalankan tugas itu, bukan tidak mungkin stagflasi juga menjadikannya negeri ini. Kalau dihindari, akan memperberat upaya menahan stagflasi.

Jika Indonesia gagal menjalankan tugas itu, bukan tidak mungkin stagflasi juga menjadikannya negeri ini. Kalau dihindari, akan memperberat upaya menahan stagflasi.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2020, kondisi ekonomi 2023 dianggap sudah bias bekerja normal sebagai buah dari keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Dengan anggapan itu, tidak tersedia lagi stimulus fiskal untuk membiayai ekonomi yang terkontraksi.

Faktanya, dunia justru menghadapi bencana baru yang lebih sulit, yakni stagflasi, selain merebaknya kembali varian baru Covid-19 yang sudah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Keberhasilan Indonesia mewujudkan slogan *Recover Together, Recover Stronger*, dengan mendorong terjadinya kerja sama dan kerja bersama demi terwujudnya langkah adil melalui jalur presidensi G20, akan menolok ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia.